

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat

Elvina Sari Hasibuan¹, Reva Maria Valianti², Andri Eko Putra³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, elvinasari01025@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, eko4378@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was conducted with the aim of describing how accountable the management of village funds is in Tanjung Payang Village, Lahat Selatan District, Lahat Regency in 2019-2021. In this study, the type of data used was secondary data in the form of Village Fund Budget reports in Tanjung Payang Village, the method used was qualitative method, the data collection technique used was documentation, literature study and interviews. The population in this study is responsible management of village funds in Tanjung Payang Village, Lahat Regency and the sample used in this research is village funds in Tanjung Payang Village, Lahat Regency in 2019, 2020, 2021. The data analysis used in this study used descriptive qualitative analysis.

Keywords: Accountability, Management Of Village Funds.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan Tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan Anggaran Dana Desa di Desa Tanjung Payang, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab di Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah dana desa di Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat Tahun 2019, 2020, 2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa periode 2019-2021 menunjukkan pengelolaan dana desa termasuk kategori sangat baik, pelaksanaan pengelolaan dana desa selama 3 (Tiga) tahun dilaksanakan dengan baik pengelolaan dana desa sepenuhnya terealisasi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

A. PENDAHULUAN

Hasanah, Fauji (2017:226) Akuntansi pemerintahan adalah sebagai cabang ilmu akuntansi pada hal ini sangat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Akuntan publik dapat diartikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintah mengingat keputusan sumber daya yang harus dibuat oleh fungsi untuk memberikan informasi pengelolaan keuangan publik berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan interpretasi informasi keuangan. Karena dana masyarakat yang dikelola pemerintah harus akuntabel untuk melihat cara kinerja pemerintah.

Dana desa adalah dengan dialokasikan oleh APBN untuk desa, suatu sistem pemerintahan negara yang strategis dengan aspek tata pemerintahan yang baik karena desa dari pemerintahan daerah khususnya kabupaten/kota dalam proses



menunjang pembangunan di desa. Dimana Desa Tanjung payang Kabupaten Lahat tahun 2019-2021.

Berdasarkan tabel Data yang diperoleh dari anggaran pendapatan (APBDesa) Tanjung Payang, bahwa dana desa yang diterimanya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana tahun 2019 dana desa yang diperoleh sebesar Rp1.497.985.200,00, pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dana desa mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,61% dan yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp1.566.979.640.00 lalu pada tahun 2021 dana desa yang diterima sebesar Rp 1.320.034.680.00 dengan presentasi penurunan sebesar 15,76%.

Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang diterima Desa Tanjung Payang Periode 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	Rp. 1.497985.200.00
2	2020	Rp. 1.566.979.640.00
3	2021	Rp. 1.320.034.680.00

Sumber: APBD Desa Tanjung Payang Tahun 2019-2021

Michael (2021:268) Adapun pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- 2) Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa dan APBDesa.
 - c. Pengelolaan keuangan desa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Pelaksanaan Dana Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat. Dengan realita kehidupan di desa bahwa dengan pendanaan yang sesuai untuk melaksanakan peran yang lebih baik perkembangan daerah tersebut. Karena permasalahannya pada

aturan perencanaan dalam menggunakan dana desa, program yang akan dilaksanakannya dibuat oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa setempat yang hanya sebatas mendengar.

Dengan proses pembahasan tersebut sistem pengelolaannya desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat desa setempat tidak mengetahui informasi bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintahan daerah dengan melalui APBD. Sehingga pada partisipasi masyarakat yang cenderung dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dana desa.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Lestari (2022:3) Analisis laporan keuangan adalah proses untuk pemeriksaan informasi keuangan dengan cara yang mudah dipahami untuk menentukan kondisi keuangan. Hasil operasi dan pengembangan perusahaan dengan menentukan hubungan antara informasi keuangan dan dimasukkan dalam laporan keuangan, supaya analisis status keuangan tahunan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi mereka yang terkena dampak dan juga untuk melakukan analisis. Peran angka status keuangan tahunan tidak dapat dipisahkan.

Analisis laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a) Pengetahuan tentang posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, baik aktivas, kewajiban maupun hasil usaha yang dicapai selama beberapa periode.
- b) Mengetahui kelemahan apa yang tidak dimiliki perusahaan.
- c) Mengetahui tindakan cara apa yang harus dilakukan terkait kondisi keuangan di masa mendatang.

Pengertian Desa

Cut Anisa Shalsabila (2022:273) Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengertian sosiologi desa adalah gambar pemerataan, kejujuran dan keterbelakangan, karena ada yang buta huruf dan masih belum dengan teknologi di era globalisasi yang semakin tinggi, dan ciri khas desa adalah petani.

Sasaran Tujuan Dana Desa

Setyadi (2019:26) Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dengan pengelolaan dana desa sebagai berikut :

- a) Dana desa digunakan untuk sistem keuangan penyelenggaraan negara, untuk perluasan sistem infrastruktur untuk memperkuat rasa kebersamaan.
- b) Dana desa disediakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d) Melakukan penghapusan perbedaan pembangunan antar desa.
- e) Peningkatan pelayanan publik di desa.
- f) Meningkatkan pendapatan dana desa dan masyarakat dengan cara melalui sistem pemerintahan.

Sumber Pendapatan Dana Desa

Dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Sumber Pendapatan Desa sebagai berikut :

- 1) Pendapatan desa berasal dari hasil usaha, kekayaan desa, swadaya dan gotong royong. Pendapatan awal desa dari pembagian anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu:
 - a) Dari dana desa memperoleh ke daerah 10%.
 - b) Dari pajak dan retribusi daerah 10%.
- 2) Bagian anggaran negara dalam pendapatan dan pengeluaran adalah bagian dari dana 10%.
- 3) Dukungan anggaran pendapatan dari pendapatan daerah provinsi dan pendapatan dari belanja daerah juga belanja daerah kabupaten atau kota.
- 4) Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 5) Pendapatan lain-lain asli desa yang sah. Berikut ini lain-lain pendapatan asli desa sebagai berikut :
 - a) Pungutan dana desa.
 - b) Hasil penjualan barang milik desa yang tidak dapat dipisahkan.
 - c) Jasa giro dengan pendapatan bunga bank.
 - d) Penerimaan bantuan sukarela dari masyarakat setempat.
 - e) Pendapatan fasilitas sosial dan fasilitas secara keseluruhan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Harventy (2018:2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Keuangan desa adalah kekayaan desa yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban desa.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian daerah sebagai berikut:

1) Prinsip Transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah hal yang paling dibutuhkan sistem pemerintahan, Transparansi pemerintah juga keterbukaan pemerintah dengan menciptakan kebijakan keuangan dengan cara mudah dilaksanakan. Transparansi pemerintahan yang timbal balik dengan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah secara bersih, efisien dan efektif, akuntabel dan responsif untuk kepentingan masyarakat.

2) Prinsip Akuntabilitas

- a) Akuntabilitas merupakan tanggung jawab publik, berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pelaporan, harus bertanggung jawab dan akuntabel kepada publik dan pengawas keuangan.
- b) Kejujuran dalam Pengelolaan keuangan
Kejujuran dalam pengelolaan dana masyarakat sangat dihargai, sehingga pengelolaan keuangan harus terdiri dari orang-orang juga dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan yang kompeten juga memenuhi tugas dalam mengelola keuangan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nur Asia Usaman Betan & Paskah Ika Nugroho (2021)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Selat Kabupaten Karangesem)	Metode Teknk analisis deskriptif kualitatif	Persamaan pada variabel meneliti tentang pengelolaan dana desa	Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti	Dari hasil analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangesem yang dilakukan secara baik dan memenuhi 4 sistem yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggung jawaban dan dimensi akuntabilitas.
2.	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberjo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	Metode deskriptif Kualiatif	Persamaan Pada Variabel tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.	Penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan secara transparan karena adanya informasi yang mudah dapat diakses juga komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat dengan perangkat desa tersebut.
3.	Fopi Yunika & Andri Eko Putra & Panca Satria Putra (2022)	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Kelekar	Metode Deskriptif Kualitatif	Persamaan pada variabel dan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaanya terletak pada objek penelitian dan variabel	Penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kelekar Kabupaten Muara Enim sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan tahap perencanaan penggunaan dana desa tidak efektif.
4	Muhammad Lutfi Iznillah (2018)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif.	Persamaan pada variabel tentang akuntabilitas pengelolaan desa. Sama-sama menggunakan metode	Perbedaanya pada objek penelitian.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada

			deskriptif kualitatif.		kisaran 86% sampai dengan 100%.	
5.	Windy, Anang Subardjo (2023)	Analisis Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Tambak Sumur Kecamatan Waru)	Metode pendekatan Kualitatif.	Persamaan pada variabel tentang pengelolaan Dana Desa dan metode kualitatif.	Perbedaanya pada objek penelitian dan tahun pengelolaan penelitian.	Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 bahwa berdasrkan asas-asas transparan , akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan sesuai anggaran.

Pemerintahan Desa

Putu Wirama (2019:78) Pemerintah desa merupakan sistem perencanaan pemerintah desa yang mempunyai kekuasaan mengatur kepentingan masyarakat. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi selama proses. Dengan setiap akhir tahun anggaran desa, kepala desa memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada camat, BPD, dan masyarakat desa.

Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2018:47) Akuntabilitas adalah mensyaratkan untuk mengambil keputusan berperilaku sesuai dengan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi yang diterimanya. Dengan perumusan kebijakan dengan bersama-sama cara dan hasil tersebut harus dapat diakses dan di komunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggung jawabkan.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab publik, berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pelaporan, harus bertanggung jawab dan akuntabel kepada publik dan pengawas keuangan, yaitu :

- a) Kejujuran dalam pengelolaan dana masyarakat sangat dihargai, sehingga pengelolaan keuangan harus terdiri dari orang-orang juga dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan yang kompeten juga memenuhi tugas dalam pengelola keuangan.
- b) Akuntabilitas merupakan tanggung jawab publik, berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pelaporan, harus bertanggung jawab dan akuntabel kepada publik dan pengawas keuangan.

Prinsip-Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Mardiasmo (2018:32) *Good Governance* adalah sebagai cara tata kelola yang baik sebuah pendekatan yang di dasarkan pada pengembangan sektor publik melalui tata kelola yang baik. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai “ *the waystate power is used in managing economic an social resources for developmentnof society*” dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara

pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) Terdapat beberapa karakteristik *Good Governance*, sebagai berikut:

- a) Partisipasi
Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan digunakan pada saat langsung dan tidak langsung karena menyatakan pendapatnya dalam proses politik publik.
- b) Penegakan Hukum
Hukum ditegakkan oleh setiap orang tanpa terkecuali, hak asasi manusia dilindungi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat dijaga.
- c) Transparansi
Dalam proses Informasi, karena informasi badan publik harus tersedia secara bebas jika perlu benar.
- d) Daya tanggap
Setiap instansi publik haruslah upaya untuk melayani kepentingan masyarakat.
- e) Berorientasi
Sebagai perantara kepentingan yang ada, berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah juga diterapkan.
- f) Berkeadilan
Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik dalam masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kualitas hidupnya.
- g) Efektifitas dan Efisiensi
Dalam proses tindakan institusional menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h) Akuntabilitas
kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak yang berwenang.
- i) Bervisi strategis
Eksekutif dan publik memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang kinerja pemerintah yang baik dalam pembangunan infrastruktur. Mardiasmo (2018:33)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek di Kantor Kepala Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan tujuan yang mendeskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban, Penelitian kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang telah dikumpulkan berulang kali dilapangan, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat dikelompokkan ke tema tertentu. Populasi dalam penelitian ini menunjukkan laporan keuangan dana desa yang bertanggung jawab di Desa Tanjung Payang Kabupaten

Lahat, dan dalam penelitian ini diambil sampel data laporan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat Tahun 2019-202. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada dan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan strategi dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data Dengan penelitian ini menggunakan teknik metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan

Dari sisi prinsip akuntabilitas, pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD), di tempuh melalui sistem pelaporan, yaitu pelaporan pertahun hal ini dengan informasi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dengan membuat laporan dan semua kegiatan adanya kuitansi di setiap bukti pembayaran.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dimana nantinya mendapat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas terdiri dari perencanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di DesaTanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat

Pada proses perencanaan pengelolaan Dana Desa diawali dengan rapat atau musyawarah. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun dengan masyarakat umum melalui musyawarah tingkat desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun dengan adanya perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat

Adanya penyampaian yang dilakukan oleh kepala desa terhadap suatu laporan yang mengimplementasikan dari kegiatan APBDesa tersebut terhadap bupati yang diinterpretasikan melalui laporan, pelaksanaan dari pelaporan tersebut tujuannya untuk dapat menjauh dari pengendalian dan pengelolaan yang dilakukan terhadap ketersediaan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan baik dan mencakup beberapa hal terkait tersebut Membuat berbagai pelaksanaan aktivitas serta mengambil ketersediaan dana terus mengalami perkembangan dan adanya perolehan yang didapatkan terhadap hasil Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yaitu rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pembangunan (RKP) yang di dalamnya direncanakan oleh APBDesa (anggaran pendapatan dan belanja desa) yang di dalamnya berisi tentang informasi program yang akan dikerjakan setiap tahunnya. Adapun pembahasan sebagai berikut :

Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tanjung Payang Tahun 2019

Tahun	Uraian	Semula (Anggaran)	Menjadi (Anggaran)	Persentase
2		3	4	5
2019	Pendapatan			
	pendapatan asli desa	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
	Pendapatan Transfer.	1.496.985.200	1.521.985.200,0	98,3%
	Jumlah Pendapatan.	1.497.985.200	1.522.985.200,0	98,3%
2019	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	321.343.500,0	329.343.500,00	97,57%
	Belanja barang perlengkapan.	14.802.700,00	14.802.700,00	100%
	Belanja alat tulis kantor dan belanja pos.	5.127.700,00	5.127.700,00	100%
	Belanja perlengkapan alat-alat listrik.	720.000,00	720.000,00	100%
	Belanja Perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan.	335.000,00	335.000,00	100%
	Belanja Barang cetak	570.000,00	570.000,00	100%
	Belanja Barang Konsumsi.	2.600.000,00	2.600.000,00	100%
	Belanja Pakaian dinas seragam/atribut.	5.450.000,00	5.450.000,00	100%
	Belanja perjalanan dinas.	5.060.000,00	5.060.000,00	100%
	Belanja Perjalanan dinas dalam kabupaten.	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
	Belanja perjalanan dinas luar kabupaten.	3.060.000,00	3.060.000,00	100%

2019	Pembangunan Kantor Desa	9.310.000,00	9.310.000,00	100%
	Belanja barang dan jasa	260.000,00	260.000,00	100%
	Belanja barang perlengkapan.	260.000,00	260.000,00	100%
	Belanja Barang cetak dan penggandaan.	260.000,00	260.000,00	100%
	Belanja modal.	9.050.000,00	9.050.000,00	100%
	Belanja modal gedung bangunan, dan taman.	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
	Upah tenaga kerja.	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
	Belanja modal bangunan material.	4.050.000,00	4.050.000,00	100%
2019	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	664.008.508,4	896.838.801,52	74,03%
	Sub bidang pendidikan.	23.000.000,00	23.000.000,00	100%
	Penyelenggaraan PAUD,TK,TPA, Madrasah non formal milik desa.	23.000.000,00	23.000.000,00	100%
2019	Sub Bidang Kesehatan	42.453.000,00	37.856.000,00	11,21%
	Penyelenggaraan posyandu.			
	Belanja barang dan jasa.	32.856.000,00	37.856.000,00	86,79%
		32.856.000,00	35.656.000,00	92,14%
2019	Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang	488.314.208,4	386.760.861,52	12,62%
	Pembangunan peningkatan jalan. usaha tani.	175.157.468,4	386.760.861,52	45,28%
	Belanja barang dan jasa.	3.291.500,00	3.291.500,00	100%
	Belanja barang perlengkapan.	291.500,00	291.500,00	100%
2019	Pembangunan Jembatan Desa	120.793.300,0	126.634.000,00	95,34%

	Belanja barang dan jasa.				
	Belanja barang perlengkapan.	240.500,00	240.500,00	100%	
		240.500,00	240.500,00	100%	
2019	Pembangunan Jembatan Desa	120.739.300,0	126.634.000,00	95,34%	
	Belanja barang dan jasa.	240.500,00	240.500,00	100%	
	Belanja Barang Perlengkapan.	240.500,00	240.500,00	100%	
		7.000.000,00	7.000.000,00	100%	
2019	Pembangunan Gapura Batas Desa				
	Belanja modal.				
	Belanja modal gedung bangunan.	7.000.000,00	7.000.000,00	100%	
		7.000.000,00	7.000.000,00	100%	
2019	Pembangunan Penggelolaan Sampah	50.230.200,00	50.230.200,00	100%	
	Belanja bahan bakar minyak.	8.630.200,00	8.630.200,00	100%	
	Belanja Jasa Honrarium.				
	Belanja modal kendaraan darat bermotor.	9.600.000,00	9.600.000,00	100%	
		32.000.000,00	32.000.000,00	100%	
2019	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	51.640.000,00	61.640.000,00	83,77%	
	Sub bidan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	14.000.000,00	14.000.000,00	100%	
	Pengadaan pos keamanan desa.	14.000.000,00	14.000.000,00	100%	
2019	Pembinaan PKK				
	Belanja barang dan jasa.	16.728.000,00	21.728.000,00	76,98%	
	Belanja barang perlengkapan.	16.728.000,00	16.728.000,00	100%	
		408.000,00	1.808.000,00	22,56%	
	Bidang				

	Pemberdayaan Masyarakat	459.993.191,0	234.917.000,00	95,81%
2019	Belanja kursus pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
	Bidang Penanggulangan Bncana	1.000.000,00	1.000,000,00	100%
2019	Jumlah Belanja.	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
		1.522.985.200	1.522.985.200,00	100%

Sumber: Alokasi Dana Kantor Desa Tanjung Payang (2019)

Dapat dilihat bahwa pada Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat mendapatkan dana satu tahun sebesar Rp.1.522.985.200,00 dari 100% anggaran satu tahun untuk pelaksanaan pembangunan kantor desa sebesar Rp.9.310.000,00 persentase 100% dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.61.640.000,00 persentase 83,77% dan bidang kesehatan Rp.37.856.000,00 persentase 11,21% dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.329.343.500 persentase 97,57%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam pengelolaan dana desa 100% telah dilakukan secara efektif akuntabilitas

Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tanjung Payang Tahun 2020

Tahun	Uraian	Semula Anggaran (Rp)	Menjadi (Anggaran)	Persentase
	2	3	4	5
2020	Pendapatan			
	Pendapatan Transfer. Dana Desa.	1.566.979.600	1.547.348.600	10,12%
	Bagi hasil pajak dan retribusi.	1.081.922.000	1.071.115.000	10,10%
	Alokasi Dana desa .	27.574.200,00	18.750.200,00	14,70%
	Jumlah Pendapatan.	457.483.440,0	457.483.440,0	100%
		1.566.979.640	1.547.348.600	10,12%
2020	Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	438.703.440,0	438.703.440,0	100%
	Belanja barang perlengkapan.	16.675.000,00	16.675.000,00	100%

	Belanja alat tulis kantor dan benda pos.	6.041.000,00	6.041.000,00	100%
	Belanja perlengkapan alat-alat listrik.	915.000,00	915.000,00	100%
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan.	490.000,00	490.000,00	100%
	Belanja barang cetak.	570.000,00	570.000,00	100%
	Belanja barang konsumsi.	6.384.000,00	6.384.000,00	100%
	Belanja Pakaian dinas seragam atribut.	2.275.000,00	2.275.000,00	100%
	Belanja perjalanan dinas.	7.560.000,00	7.560.000,00	100%
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten.	7.560.000,00	7.560.000,00	100%
	Pembangunan Desa	660.623.639,0	282.829.020,0	23,35%
2020	Belanja barang dan jasa.	26.000.000,00	26.000.000,00	100%
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	59.574.584,70	70.502.110,30	84,50%
2020	Pembangunan peningkatan.	59.574.584,70	70.502.110,30	84,50%
	Jalan lingkungan.	3.879.500,00	2.879.500,00	13,47%
	Belanja barang dan jasa.	279.500,00	279.500,00	100%
	Bidang Pembinaan Masyarakat	62.277.000,00	62.277.000,00	100%
2020	Belanja barang dan jasa.	18.000.000,00	18.000.000,00	100%
	PembinaanPKK	20.525.000,00	20.525.000,00	100%
	Belanja barang dan jasa.	20.525.000,00	20.525.000,00	100%
	Belanja barang perlengkapan.	7.805.000,00	7.805.000,00	100%

Sumber: APBDesa Desa Tanjung Payang, Tahun 2020

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2020 bahwa Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat mendapatkan dana sebesar Rp.1.547.348.64,00 dari 100% anggaran satu tahun. Bahwa dilihat pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan persentase sebesar 98,42% pendapatan yang didapatkan. Dalam periode satu tahun dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 438.879.540,00 dan pembangunan desa anggaran sebesar Rp. 660.623.693,00 dan bidang kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000,00 digunakan secara efektif. Juga digunakan bidang pekerjaan umum penataan ruang yang dianggarkan sebesar Rp. 70.502.110,30 dan bidang pembinaan kemasayarakatan dianggarkan dalam satu tahun sebesar Rp. 62.277.000,00 digunakan dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam laporan pengelolaan dana desa telah dilakukan secara akuntabilitas dimana telah menyampaikan pertanggung jawaban dengan pemerintah baik.

Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tanjung Payang Tahun 2021

Tahun	Uraian	Semula Anggaran(Rp)	Menjadi (Anggaran)	Persentase
	2	3	4	5
2021	PENDAPATAN			
	Pendapatan transfer. Dana Desa.	1.320.034.680.0	1.437.622.440	91,82%
	Bagi hasil pajak dan retribusi.	957.181.000,00	957.181.000,0	100%
	Alokasi dana desa.	957.181.000,00	18.750.200,00	51,04%
		343.225.080,00	343.225.080,0	100%
2021	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	355.058.894,00	508.512.140,0	69,82%
	Penyelenggara pemerintah desa.	316.338,00	426.592.140,0	74,15%
	Belanja Pegawai.	28.800.000,00	38.400.000,00	75%
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan.	480.000,00	915.000,00	52,45%
	Belanja barang cetak.	580.000,00	690.000,00	84,05%
	Belanja barang konsumsi.	5.038.000,00	5.976.000,00	84,30%
	Belanja pakaian dinas seragam atribut.	3.380.000,00	7.778.700,00	43,45%
	Belanja perjalanan dinas.	5.670.000,00	7.560.000,00	75%

	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten.	5.670.000,00	7.560.000,00	75%
2021	Pembangunan Desa Belanja modal bangunan	16.741.214,00	20.822.000,00	80,40%
	Sub Bidang pendidikan.	16.741.214,00	10.532.000,00	15,89%
		30.200.000,00	30.200.000,00	100%
2021	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggara posyandu	86.346.600,00	112.978.300,0	76,42%
	belanja barang dan jasa.	36.403.000,00	36.403.000,00	100%
2021	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	346.429.120,00	278.478.800,0	12,44%
2021	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	54.422.000,00	71.538.500,00	76,07%
	Belanja barang dan jasa.	13.500.000,00	18.000.000,00	75%
		13.500.000,00	18.000.000,00	75%
2021	Pembinaan PKK Belanja barang dan jasa	20.170.000,00	30.343.500,00	66,47%
		20.170.000,00	30.343.500,00	66,47%
	Belanja perlengkapan. Jumlah Belanja.	50.000,00	11.323.500,00	10,15%
		1.321.299614,00	1.441.550.700	91,65%

Sumber: APBDesa Desa Tanjung Payang Tahun, 2021

Dapat dilihat tabel diatas bahwa Desa Tanjung Payang pada tahun 2021 mendapatkan dana sebesar Rp.1.437.622.440,00 dari 100% anggaran satu tahun. Bahwa dilihat tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.109.726.200 pendapatan yang didapatkan. Dalam periode satu tahun dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 508.512.140,00 dari persentase 69,82% dan bidang pembangunan desa sebesar Rp. 20.822.000,00 dari persentase 80,40% dan bidang kesehatan sebesar Rp. 112.978.300,00 dari persentase sebesar 76,42% juga di Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang sebesar Rp. 278.478.800,00 dari persentase sebesar

12,44% dan Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 71.538.500,00 dari persentase 76,07%, Digunakan secara baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam laporan pengelolaan dana desa telah dilakukan secara akuntabilitas dimana telah menyampaikan pertanggung jawaban dengan pemerintah baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa termasuk kategori baik. proses perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dari musyawarah terlebih dahulu untuk membahas RPJMDesa yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Dari RPJMDes akan dipilih program-program penting yang disepakati untuk dituangkan dalam APBDes.
2. Tahapan Pelaksanaan pengelolaan dana desa tanjung payang selama 3 tahun termasuk baik. Dalam pengelolaan dana desa sepenuhnya terealisasi, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sepenuhnya sudah dilaksanakan untuk memajukan desa.
3. Tahap pelaporan atau pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tanjung Payang.
 - a. Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Payang sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
 - b. Pertanggung jawaban pembangunan desa menunjukkan bahwa Kepala Desa Tanjung Payang telah memberikan laporan pertanggung jawaban secara periodik.
 - c. Sebaiknya Desa Tanjung Payang harus diadakan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang penerapan alokasi dana desa untuk perangkat desa dan tentunya pelatihan dan pemahaman lebih lanjut tentang akuntabilitas untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat meningkatkan pembangunan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa untuk turut serta dalam perencanaan pengelolaan dana desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat.
2. Pengelolaan dana desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan dan pembinaan kemasyaraatan saja. Pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan dapat terealisasi semua dengan baik, bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan, bidang kehutanan dan lingkungan hidup , dan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebudayaan dan keagamaan, bidang pkk dan bidang kelembagaan masyarakat.

3. Pengelolaan dana desa sudah sesuai rencana dan sudah teralisasi dengan baik, tapi tentu masih ada kekurangan oleh karena itu diharapkan supaya pemerintah Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Untuk lebih memaksimalkan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat semakin lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Shalsabila, C. A. (2022). Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Syariah.(Studi Kasus: Kantor Keuchik Gampong Hagu Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mardiasmo, M.B.A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Lestari, D. (2022). Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo. In *Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah*.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017:226). Akuntansi pemerintahan. *Bogor: In Media*.